

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *ZERO WASTE* PEMPROV NTB DI SUNGAI  
JANGKOK KOTA MATARAM TAHUN 2023-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Penyusunan Skripsi  
pada Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

**Abdul Basith Al-Majid**

**417130011**

**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

## ABSTRAK

Fenomena yang sejak awal berdampak buruk dan cukup membahayakan kehidupan manusia dalam kesehariannya, yaitu bencana pengelolaan sampah yang menyebabkan banjir hampir tidak pernah usai membutuhkan solusi guna memecahkan permasalahan krusial ini. Dalam menghadapi laju tumbuhnya berbagai sektor penunjang, Pemerintah Daerah NTB harus bisa mengelola sampahnya dengan lebih baik, salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan atau *Sustainable Waste Management* yang mulai banyak diterapkan di Asia. Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh Gubernur NTB tentang pengelolaan sampah. Perda ini mengatur kebijakan pengelolaan sampah pada tempat pembuangan terakhir (TPA) regional, Bank Sampah Induk Regional, Pengelolaan sampah pada kawasan khusus, sungai, perairan pesisir, dan Kawasan hutan. Perda ini kemudian dijadikan dasar hukum pelaksanaan program *Zero Waste* di setiap desa, kabupaten dan kota di NTB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan *Zero Waste* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram sebagai manifestasi pengelolaan bebas sampah di Sungai Jangkok. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu pemerintah desa dan masyarakat di Sungai Jangkok Ampenan Tengah Kota Mataram. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan berupa jurnal, artikel, dan website untuk memperkuat data penelitian. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat mengenai program *zero waste* ini sangat baik karena masyarakat memahami program ini. Program *zero waste* ini dilaksanakan dengan sangat baik sehingga bisa memunculkan kesadaran masyarakat akan sampah dan membuat masyarakat menjadi lebih peduli serta bisa membuat masyarakat melakukan aksi kebersihan setiap bulannya, walaupun ada hal yang masih kurang dalam program *zero waste* ini, yaitu sosialisasinya karena hanya dilakukan satu kali.

**Keywords :** Sampah, Kebijakan, *Zero Waste*, Efektivitas.

## ABSTRACT

*A solution is needed to handle this critical issue, as certain phenomena, including the waste management disaster that has continuously produced flooding, have had a detrimental influence and posed substantial hazards to human life since its inception. The NTB Regional Government needs to enhance its waste management procedures in order to keep up with the rapidly expanding supporting sectors. One such strategy is sustainable waste management, which is being used more and more across Asia. The Regional Regulation issued by the Governor of NTB concerning waste management regulates policies for managing waste at regional landfills, regional main waste banks, waste management in special areas, rivers, coastal waters, and forest areas. This regulation serves as the legal basis for implementing the Zero Waste program in every village, district, and city in NTB. This study aims to assess the effectiveness of the Zero Waste policy implemented by the Mataram City government as a manifestation of waste-free management at the Jangkok River. The primary data used in this research were obtained through interviews with informants, including village officials and the community in the Jangkok River area of Ampenan Tengah, Mataram City. Secondary data were collected through literature reviews, such as journals, articles, and websites, to support the research data. The results of this study indicate that public awareness of the Zero Waste program is very high, as the community understands the program. The Zero Waste program has been implemented effectively, raising public awareness about waste, increasing concern, and leading to monthly community cleanup actions. However, one area of improvement is the program's socialization, which has only been conducted once.*

**Keywords:** Waste, Policy, Zero Waste, Effectiveness

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fenomena yang sejak awal berdampak buruk dan cukup membahayakan kehidupan manusia dalam kesehariannya, yaitu bencana pengelolaan sampah yang menyebabkan banjir hampir tidak pernah usai membutuhkan solusi guna memecahkan permasalahan krusial ini. Regulasi dari pemerintah serta kesadaran masyarakat lebih diutamakan demi kualitas lingkungan hidup tempat manusia bermukim dan bertahan hidup. Upaya pengolahan sampah secara lini menjadi *issue* memperhatikan sehingga memaksa pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang kompetitif menangani tingkat keparahan keberadaan sampah di aliran sungai dekat permukiman maupun pinggiran kota disuatu wilayah. Sampah yang tidak terkelola dengan baik justru menyebabkan kerugian dari segi kesehatan masyarakat dan yang prioritas dalam hal ini adalah sarana dan prasarana dilingkungan itu sendiri.

Perkembangan produksi sampah setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup tinggi, olehnya diharapkan agar pengelolaannya juga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Permasalahan ini bukan hanya akan menjadi masalah jangka pendek, tetapi akan menjadi masalah jangka panjang, sehingga perlu disentuh dengan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka penanganannya akan lebih terintegrasi dengan hasil maksimal. Masalah persampahan terjadi diantaranya tidak terkelolanya pola pemukiman dan pesatnya jumlah penduduk. Maka salah satu aspek yang diupayakan adalah sarana dan prasarana yang memadai sebagai media untuk pengelolaan persampahan (Rizal, 2011).

Dalam menghadapi laju tumbuhnya berbagai sektor penunjang, Pemerintah Daerah NTB harus bisa mengelola sampahnya dengan lebih baik, salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan atau *Sustainable Waste Management* yang mulai banyak diterapkan di Asia. Elemen masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempat pembuangan sampah.

Masyarakat membuang sampah di tempat-tempat terbuka yang dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka. Sebagian besar warga membuang sampah disungai jangkok yang mengalir. Alasan warga membuang di bantaran sungai adalah karena tidak tersedianya fasilitas pembuangan sampah yang mudah dijangkau di Desa dan sungai merupakan lahan kosong yang terdekat (Ramadhanti, 2020).

Pada tanggal 5 juli 2019, ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh Gubernur NTB tentang pengelolaan sampah. Perda ini mengatur kebijakan pengelolaan sampah pada tempat pembuangan terakhir (TPA) regional, Bank Sampah Induk Regional, Pengelolaan sampah pada kawasan khusus, sungai, perairan pesisir, dan Kawasan hutan. Perda ini kemudian dijadikan dasar hukum pelaksanaan program *Zero Waste* di setiap desa, kabupaten dan kota di NTB (Kurniawati, 2020). Di tengah pandemi Covid-19, program NTB *Zero Waste* terus didorong. Pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memfokuskan program *Zero Waste* di tengah pandemi ini di kota mataram. Dinas LHK juga harus tetap berlari mengejar target-target pengurangan sampah lebih strategi (Syamsudin, 2020).

Menurut Peraturan Daerah Kota Mataram Nomer 1 Tahun 2019 tercantum dalam pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menentukan maupun memutuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan yang meliputi: *Pertama*, Arah pengurangan dan penanganan sampah, Program pengurangan dan penanganan sampah. *Kedua*, Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu (BPK, 2019). Dari penjelasan diatas pemerintah daerah Kota Mataram harus menjalankan amanat perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut dengan kurun waktu tertentu sesuai dengan keadaan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng Pemerintah Kota Mataram dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program *Zero Waste* atau bebas Sampah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Irwan Rahadi menyampaikan, pihaknya telah menyusun regulasi terkait instrumen penanganan sampah hingga pengurangan (Meirina, 2019).

Sungai merupakan salah satu sumber air yang menunjang berbagai kehidupan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkok berada di Pulau Lombok dengan Luas 170,298 km dan panjang sungai utama 47,106 km membujur dari arah timur ke barat melintasi Kabupaten Lombok Barat di bagian hulu dan Kota Mataram di bagian hilir, serta bermuara di Selat Lombok. Pencemaran di Sungai Jangkok dapat mempengaruhi kesehatan dan keberadaan makhluk hidup sekitar. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan dan sanitasi DAS Jangkok antara lain: sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat pengelolaan sampah atau limbah, tata guna lahan sesuai dengan fungsinya (Faqih & Fitasari, 2020).

Dari hasil penelitian yang dilakukam oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama *Ecological Observation and Wetlands Conservation* pada Januari 2023 terdapat tujuh sungai di Pulau Lombok dan dua di antaranya sungai di Kota Mataram yakni, Kali Ning dan Sungai Jangkok diketahui telah tercemar mikroplastik (Suara NTB, 2023). Hal ini sangat berkaitan dengan dampak kebencanaan, bahkan kondisi ini akan menimbulkan akibat dari polusi sampah yang ada di sungai. Hasil investigasi Walhi tentunya menjadi informasi sekaligus catatan khusus untuk Pemkot Mataram maupun Pemprov NTB, agar sungai ini diintervensi lebih terukur dan objektif untuk mengurangi dampak polusi akibat sampah di sungai supaya kualitas air juga terjaga. Di awal tahun 2024 Walikota Mataram menargetkan kawasan kumuh dan permasalahan sampah di perkotaan ditargetkan akan dituntaskan. Untuk mendukung tujuan pengentasannya ialah melalui program *Zero Waste*. Skala kawasan di Kota Mataram dimulai sejak tahun 2019 melalui penataan daerah aliran sungai (DAS) Jangkok (SuaraNTB, 2024).

Faktor utama yang mempengaruhi pencemaran air Sungai Jangkok, Kota Mataram adalah belum tertanganinya pembuangan sampah dan limbah cair rumah tangga. Masalah tersebut diduga dipengaruhi oleh situasi permukiman di bantaran sungai. Kedekatan permukiman dengan tepian air mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar tepian air tersebut. Pemerintah memiliki peran yang paling tinggi dalam program pengendalian pencemaran air sungai. Namun, untuk mensukseskan program tersebut, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat penting (Haryono et al., 2024). Oleh karena itu strategi

pengendalian pencemaran air yang sangat penting untuk dilakukan adalah melakukan perubahan persepsi masyarakat terhadap sungai.

Berkenaan dengan hal ini, telah mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS Terpadu melalui berbagai program pemerintah, yang merupakan panduan tentang mengelola DAS yang harus dipertahankan karena kondisinya masih bagus dan bagaimana suatu DAS harus dipulihkan kondisinya karena lebih banyak lahan kritisnya (Firda et al., 2012). Keterpaduan mengandung terbinanya keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil. Keterpaduan pengelolaan DAS memerlukan partisipasi yang setara dan kesepakatan para pihak dalam segala hal mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan (Wibowo et al., 2015).

Pengelolaan sampah membutuhkan sistem terpadu untuk mencapai tujuan yang optimal, pada saat yang bersamaan implementasi kebijakan tersebut menghasilkan kondisi yang jauh lebih baik. Permasalahan umum yang terjadi pada sungai-sungai adalah kebiasaan atau perilaku masyarakat dan meningkatnya permukiman penduduk di bantaran sungai yang mengalirkan limbahnya langsung ke badan air.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Efektivitas kebijakan *Zero Waste* Pemprov NTB di Sungai Jangkok Kota Mataram Tahun 2023-2024 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui efektivitas kebijakan *Zero Waste* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram sebagai manifestasi pengelolaan bebas sampah di Sungai Jangkok.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan berupa :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai pengembangan keilmuan tentang Efektivitas Kebijakan *Zero Waste* Pemprov NTB di Sungai Jangkok Ampenan Tengah Kota Mataram dan sebagai referensi bagi pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **A. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai tambahan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang efektivitas kebijakan *zero waste* pada lingkup yang berbeda.

#### **B. Bagi Akademisi**

Untuk mengetahui pengembangan kebijakan *zero waste* pemprov NTB di Sungai Jangkok khususnya Ampenan Tengah Kota Mataram sekaligus sebagai langkah memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang kebijakan *zero waste*.

#### **C. Bagi Peneliti**

Sebagai bahan agar menambah wawasan peneliti mengenai masalah efektivitas kebijakan *zero waste* Pemprov NTB di Sungai Jangkok Ampenan Tengah Kota Mataram, serta menumbuhkan sikap profesionalisme kerja dan pemecahan masalah secara ilmiah.

## **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan batas penelitian atau bingkai penelitian yang ditujukan untuk mempersempit permasalahan guna membatasi ruang penelitian (Riduwan, 2011). Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi.

### **1.5.1 Ruang Lingkup Lokasi**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil tempat penelitian di Sungai Jangkok. Kawasan yang dikhususkan untuk diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kawasan Sungai Jangkok Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram. Lokasi ini diambil oleh peneliti karena seperti yang disampaikan oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama *Ecological Observation and Wetlands Conservation* pada Januari 2023 bahwa Sungai Jangkok adalah sungai yang di antaranya tercemar sampah mikroplastik.

### **1.5.2 Ruang Lingkup Materi**

Dalam proses pemenuhan data yang akan di ambil dalam permasalahan yang di teliti, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan *zero waste* Pemprov NTB di Sungai Jangkok Ampenan Tengah Kota Mataram. Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini meliputi, Pengetahuan dan sosialisasi program *zero waste* yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, ketepatan sasaran program *zero waste*, ketepatan sasaran program *zero waste* serta pemantauan program *zero waste*.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam sebuah penyusunan penelitian, maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik, sehingga dalam penyusunan penelitian dapat lebih jelas dan terstruktur, Adapun sistematika tersebut antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, berisi menjelaskan atau menjabarkan terkait Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini, berisi tentang Terminologi Judul, Tinjauan Pustaka, Tinjauan Kebijakan, dan Penelitian Terdahulu.

## **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Dalam Bab ini, berisi tentang metode-metode yang digunakan maupun analisis pengolahan dalam penelitian yang akan dipakai, sehingga dalam melakukan pengolahan data dapat lebih terarah, serta dapat menunjukkan hasil metode penelitian atau analisis yang digunakan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan di Sungai Jangkok. Pada bab ini akan dijelaskan efektifitas program *zero waste* pemprov NTB di Sungai Jangkok Ampenan Tengah Kota Mataram.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian yang dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya terkadit permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah :

- A. Sosialisasi program yang dilakukan oleh pemerintah terhadap program *Zero Waste* sudah baik karena masyarakat dapat menjelaskan dan mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dalam menjalankan program *zero waste* ini. Walaupun sosialisasi dilakukan hanya satu kali pada tahun 2023 namun gerakan program *Zero Waste* yang dibuat oleh pemerintah dapat disambut dengan sangat baik oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih tahu dan memahami tentang kebersihan lingkungan di Sungai Jangkok Ampenan Tengah.
- B. Pelaksanaan program *Zero Waste* yang dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat Sungai Jangkok khususnya Ampenan Tengah dengan aksi bersih-bersih (*clean up*) yang dilakukan selama sebulan sekali bisa dikatakan cukup rutin. Pemerintah yang menjadi pembuat program dan dibantu oleh masyarakat sama-sama melaksanakan aksi kebersihan lingkungan. Sehingga pelaksanaan maupun pengelolaan program *zero waste* yang dilaksanakan di Sungai Jangkok bisa dibilang berjalan dengan baik.
- C. Dalam mencapai tujuan program yang meliputi program *zero waste* ini diharapkan agar semakin menimbulkan kesadaran kebersihan lingkungan dalam masyarakat. Peran pemerintah sebagai pembuat dan bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan program akan membuat terciptanya rasa peduli masyarakat terhadap sampah karena masyarakat dapat secara langsung mendapatkan manfaat dari program *zero waste*.

D. Dampak dan manfaat yang diterima oleh masyarakat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah beserta masyarakat ini sangat banyak. Lingkungan tempat tinggal masyarakat menjadi lebih bersih dan asri, hal ini membuat masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Jangkok akan lebih senang dan nyaman dengan keadaan lingkungan yang semakin bersih ini. Dengan terlaksanakannya program *Zero Waste* ini serta masyarakat yang juga mendapatkan manfaat secara langsung dari program ini maka bisa dikatakan efektivitas kebijakan program *zero waste* di Sungai Jangkok Kota Mataram khususnya di Ampenan Tengah ini mencapai taraf yang efektif.

#### **4.2 Saran**

- A. Kepada pemerintah pembuat kebijakan untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi program *Zero Waste* ini agar program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih baik dengan adanya pemahaman program yang lebih dari masyarakat. sosialisasi program dapat dilakukan dengan lebih memanfaatkan atau mengkomidir lembaga pemerintah yang lebih bawah atau dengan memanfaatkan organisasi masyarakat sekitar sehingga pemahaman akan program *zero waste* bisa lebih mudah didapatkan oleh masyarakat dan juga akan semakin luas masyarakat yang mengetahui dan memahami hal ini, sehingga nantinya akan timbul kesadaran yang lebih besar dari masyarakat akan kebersihan sampah dalam hal ini program *zero waste*.
- B. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam menjalankan atau melaksanakan program *zero waste* dalam hal ini kebersihan sampah di Sungai Jangkok khususnya Ampenan Tengah. Dengan diadakannya bersih-bersih yang lebih rutin dari biasanya diharapkan dapat menjadi contoh dan menimbulkan kesadaran yang lebih baik lagi terhadap sampah. Dengan adanya program *zero waste* ini juga diharapkan agar masyarakat dapat lebih menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar Sungai Jangkok Ampenan Tengah Kota

Mataram karena dengan begitu tempat tinggal masyarakat akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan untuk tinggal di Sungai Jangkok Ampenan Tengah Kota Mataram.

